PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)

GERI BALDI

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at SKPD Bandung. The phenomenon that is still going on Internal Supervision of the Local Government Performance that Parliament indicated, the age of most roads in the city of Bandung just six months after the development and maintenance. This was due to lack of supervision, and lack of accountability in agency division. Goal Clarity phenomenon Budget to the Local Government Performance is still a lot of funds are not allocated in accordance with the place. Based on the audit of West Java province in 2014, by 40% to reach 2,4 terliun budget users not on target. The purpose of this study is to determine the effect of the Internal Audit and Budget Targets Clarity on Local Government Performance Bandung.

Types of research consists of descriptive research to describe the implementation of the Internal Control, Target Clarity Budget and Local Government Performance. As well as verification research to prove the hypothesis in research purposes using test equipment PLS. The research unit is SKPD Bandung. The sampling technique using saturated sample to the total population and the same sample, namely on 25 SKPD with respondents consisting of two respondents, part Head and Head of the Budget. This research method is descriptive and verification.

Descriptive explain Internal Control goes well, Clarity Performance Targets Local Government budget is quite good. In the verification showed that the Internal Audit significantly affect the Government Performance and Clarity criteria have a significant effect on the Budget Targets Local Government Performance with high criteria.

Keywords: Internal Control, KSA and Local Government Performance.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2013: 26). Keberhasilan organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya diluar keuangan (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 157).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi alasan mengapa Pemerintahan Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan dalam pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan peranan pengawasan intern yang memadai yaitu dari atasan lngsung kepada bawahannya. Pengawasan intern inilah yang dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi sehingga dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, kemudian mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana (Sukmana dan Anggarsari, 2009).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis *(strategic planning)* suatu organisasi (Indra:2006).Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001).

Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran.Terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran, salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979 dalam Hevyana, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Seberapa besar Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai Pengaruh Pengawasan Intern Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besar Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besar Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah Kota Bandung
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran antara sarana evaluasi mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Bagi Peneliti
   Peniliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Pembaca
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademik

Dapat meningkatan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan usulan penelitian yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengawasan Intern

Menurut Arifin Sabeni dan Imam Gozali (2001:67) pengertian Pengawasan Intern adalah Pengawasan Intern merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik".

Menurut Mulyadi (2001:163), ada empat indikator sistem pengawasan intern, yaitu :

a) Menjaga harta organisasi
b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
c) Mendorong efisiensi
d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Ginting (2010) dalam Yusri Hazmi (2012) menyatakan bahwa: Kejelasan Sasaran Anggaran adalah Sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Menurut Ginting (2010) dalam Yusri Hazmi (2012), indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jelas
   Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2. Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

3. Dapat di Pahami
   Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006: 25) mengungkapkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah adalah Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu."

Menurut Rahmad Hidayat (2009) mengungkapkan bahwa Kinerja pemerintah daerah merupakan Cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mahsun (2006: 77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan *(Input)*
2. Indikator proses *(Process)*
3. Indikator keluaran *(Output)*
4. Indikator hasil *(Outcomes)*
5. Indikator manfaat *(Benefit)*
6. Indikator dampak *(Impact)*

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ihyaul ulum (2009:135) mengatakan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

Dalam penelitiann Astri Kuswandari (2014) dapat dilihat bahwa Pengawasan Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, hal ini berarti pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh Pengawasan Intern yang dilaksanakan dengan baik.

Kemudian dalam hasil penelitian sebelumya menunjukan bahwa menurut Wawan Sukmana Dan Lia Anggarsari (2009) secara parsial Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

2.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Anthony et. All (2012:25) mengemukakan bahwa Anggaran berhubungan dengan kinerja yang tercapai karena merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi, Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Selanjutnya dalam penelitiannya Yusri Hazmi (2012) dari hasil penelitiannya ini diperoleh bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah SKPD Kota Bandung.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan metode penelitian yaitu Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan

penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:147) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verikatif sebagai berikut Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator, sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi variabel dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis factor.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Variabel Bebas *(Independen)*
   Menurut Sugiyono (2014:39), Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:27), Variabel bebas merupakan variabel yang pengaruhnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh penulis untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang di observasi dalam kaitannya dengan variabel lain. Variabel *independent* pada penelitian ini adalah Pengawasan Intern (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2).
2. Variabel tidak Bebas *(Dependen)*
   Menurut Sugiyono (2014:39), Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:27), Variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang keberadaannya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas (Y) adalah Kinerja Pemerintah Daerah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah Data Primer. Menurut Sugiyono, (2010:137) mendefinisikan Data Primer adalah Sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan *(Field Research)* dan studi kepustakaan *(Library Reseach)*. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*.
   a) Wawancara *(Interview)* Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti".
   b) Kuesioner Menurut Umi Narimawati (2010:40) kuisioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".
2. Penelitian kepustakaan *(Library Reseach)*

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (t*ext book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang

diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 81), menyatakan bahwa pengertian sampel dapat dikatakan sebagai Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Menurut Sugiyono (2014:85) *Sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 25 orang dan Kepala Sub Bagian Anggaran 25 orang, maka total semua responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati (2010:42), validitas didefinisikan sebagai berikut: *Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure.*

menurut Sugiyono (2013:3) validitas didefinisikan sebagai berikut: Validitas adalah menunjukan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibilitas adalah Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

Uji Realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengukapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji realibilitas ini adalah *Split Half Method* (*Spearman – Brown Correlation)* atau Teknik Belah Dua.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Umi Narimawati (2010:41), metode analisis Adalah proses mencari dan menyusun sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Deskritif
   Penilitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambar bagaimana masing-masing variabel penelitian.
2. Analisis Verifikatif
   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistic yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software Smart PLS 3.2.6.
   Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode Partial Least Square (PLS) dijelaskan yaitu:
   “Model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.1.1 Hasil Uji Validitas

Sebelum menguji pengaruh antar variabel terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan *Pearson Correlation*. Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*).

Butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* nya lebih dari nilai r_{tabel} dalam penelitian ini nilai r_{tabel} adalah 0.279 (Signifikansi 5% &50 responden). Hasil uji validitas menunjukkan semua item memiliki nilai nilai *pearson correlation* >0.279 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel Pengawasan Intern (X_1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) dan item Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah valid.

4.1.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas untuk masing masing butir pernyataan kuesioner dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah kuesioner telah mengukur dengan cermat dan tepat apa yang hendak diukur. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Split Half* dimana kuesioner dinyatakan *reliable* apabila hasil output perhitungan *Split Half* nya lebih dari nilai r_{tabel} yaitu 0.279 (signifikansi 5%, responden 50).

Dari Hasil output Spss didapat nilai *Split Half* sebesar 0.722 nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.279 (signifikansi 5%, responden 50). Karena nilai *Split Half* 0.722> nilai r_{tabel} 0.279 maka dapat dikatakan item-item tersebut reliabel.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga harta organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.Yang menjadi indikator untuk Pengawasan Intern pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Menjaga Harta Organisasi**,** Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi**,** Mendorong efisiensi**,** Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Rekapitulasi rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 4 indikator variabel Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

No. Angket	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Menjaga Harta Organisasi	228	250	91%	Sangat Baik
2	Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi	218	250	87%	Sangat Baik
3		230	250	92%	Sangat Baik
4	Mendorong Efisiensi	117	250	47%	Kurang
5		167	250	67%	Cukup
6	Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen	163	250	65%	Cukup
7		177	250	71%	Baik
TOTAL		**1300**	**1750**	**74%**	**Baik**

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Kejelasan Sasaran Anggaran

Sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang menjadi indikator pada penelitian ini untuk variable Kejelasan Sasaran Anggaran adalah Jelas, Spesifik dan Dapat Dimengerti. Rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 3 indikator variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang di aplikasikan kedalam 4 pernyataan adalah sebagai berikut:

No. Angket	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
8	Jelas	118	250	47%	Kurang
9		145	250	58%	Cukup
10	Spesifik	161	250	64%	Cukup
11	Dapat Dipahami	193	250	77%	Baik
TOTAL		**617**	**1000**	**62%**	**Cukup**

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang

dalam perumusan skema stategis *(strategic planning)* suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Dari 6 indikator yang digunakan dalam variabel ini di implementasikan kedalam 8 pernyataan kuesioner dengan rata-rata skor penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Angket	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
12	*Input*	195	250	78%	Baik
13	*Process*	216	250	86%	Sangat Baik
14	*Output*	200	250	80%	Baik
15		148	250	59%	Cukup
16	*Outcomes*	209	250	84%	Sangat Baik
17	*Benefit*	204	250	82%	Baik
18	*Impact*	147	250	59%	Cukup
19		108	250	43%	Kurang
TOTAL		**1427**	**2000**	**71%**	**Baik**

4.1.3 Hasil Analisis Verifikatif

Tahapan pengujian pengaruh dari Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka selanjutnya dilakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah *structural equation modeling* (SEM) dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software Smart PLS 3.2.6.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model structural (*inner model*). Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel *manifes* (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.4 Pengawasan Intern (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengawasan Intern diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktika kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ1= 0, Pengawasan Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

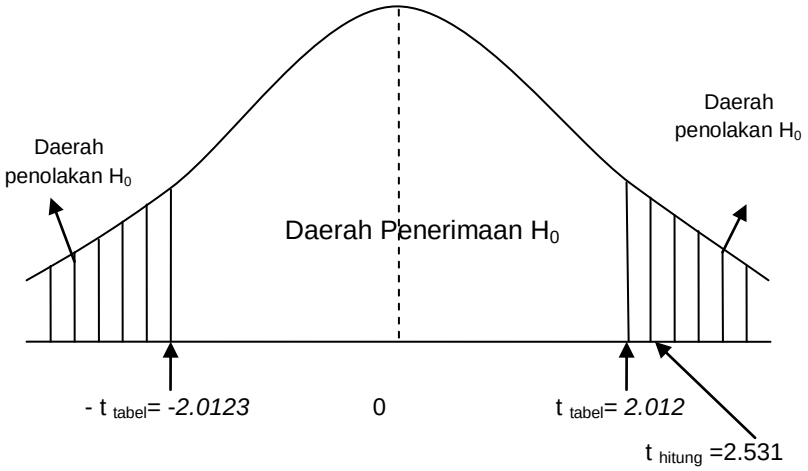
Ha: γ1≠ 0, Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka t_{tabel} adalah *2.012* (df=50-2-1=47).

Uji *t* Pengaruh Pengawasan Intern (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah(Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_1>Y	0.334	2.531	*2.012*	$H_{0\ Ditolak}$	Signifikan

Pada tabel 4.36 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.531>*2.012* (t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan Hipotesis $X_1 > Y$

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.531 berada didaerah penolakan Ho ($t_{hitung}>t_{tabel}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.1.5 Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kejelasan Sasaran Anggaran diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktikan kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ2= 0, Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

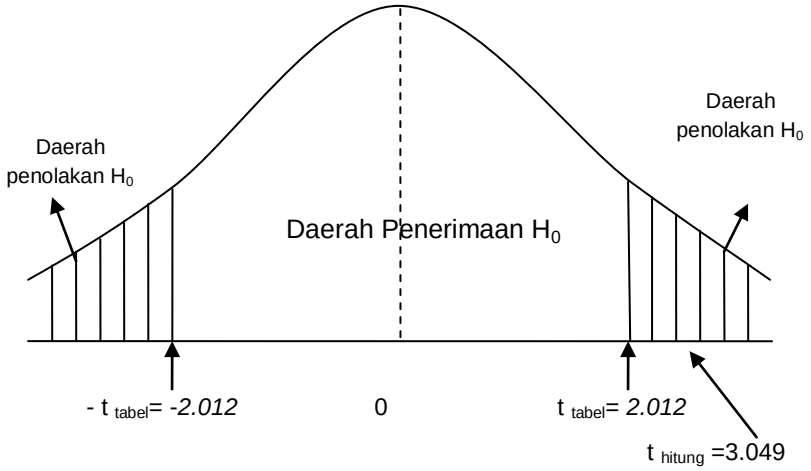
Ha: γ2≠ 0, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka t_{tabel} adalah *2.012* (df=50-2-1=47).

Uji *t* Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran(X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_2>Y	0.454	3.049	*2.012*	H_0 Ditolak	Signifikan

Pada tabel 4.37 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.049>*2.012* (t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan Hipotesis X_2>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.049 berada didaerah penolakan Ho ($t_{hitung}>t_{tabel}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Intern (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 22.7%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Sedang yaitu sebesar 0.679. t_{hitung} diperoleh sebesar 2.531, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.012*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Pengawasan Intern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Bandung. Pengawasan Intern memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang berarti semakin baik Pengawasan Intern maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula.

4.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerahmemberikan pengaruh sebesar 32.1%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Tinggi yaitu sebesar 0.709 (0.70-0.90). t_{hitung} diperoleh sebesar 3.049, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.012*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang Kejelasan Sasaran Anggaranmemberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Bandung. Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin jelasanya Sasaran Anggaran maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Bandung semakin baik pula.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengawasan Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, artinya semakin baik Pengawasan Intern dalam melakukan pembagian tanggungjawaban di setiap instansi maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang ingin dicapai.
2) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, artinya semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran di setiap instansi dalam menjalankan program-program tahunan maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang ingin dicapai.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. **Saran Operasional**

a) Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Pengawasan Intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yaitu harus di tingkatkan lagi pengawasan intern di setiap SKPD terutama dalam hal mendorong efisiensi atau pembagian tanggungjawaban pada suatu aktivitas pengawasan pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Bandung, agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang mengakibatkan rendahnya kualitas kinerja pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Bandung.

b) Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan Kejelasan Sasaran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yaitu SKPD Kota Bandung harus lebih meningkatkan lagi kejelasan sasaran anggaran dalam pencatatan penggunaan anggaran yang digunakan agar dana-dana tersebut bisa teralokasikan sesuai dengan tempatnya dan tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam dalam menjalankan program-program tahunan yang akan mengakibatkan berkurangnya kualitas kinerja pada SKPD Kota Bandung.

2. **Saran Akademis**

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintahan pusat atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A, Erwan., dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Agus Purwolo. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Desckripte.* Edisi Kedua Jakarta : Salemba Empat

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah.* Fokus Media: Bandung.

Dr. Nur Indriantoro, M.Sc., Akuntan, Drs. Bambang Supomo, M.Si. Akuntan, 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta : Edisi Pertama, Penerbit BPFE.

Dharmanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan: Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Erica Magdalena. *Pengaruh akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manejerial Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).* JOM FEKON Vol. 1 no. 2014.

Ginting, Paham & Syafrizal Helmi Situmorang. 2010. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset.* Medan: USU Press.

Ghozali, Imam, 2006. Aplikai *Analisis Multivarite dengan SPSS,* Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik,* Yogyakarta: ANDI.

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik,* Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mahsun. 2013. *Metode Penelitiam Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik,* Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2011, Manajemen *Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontenporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan.* Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa,* Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

M. Nafarin, 2000, *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, 2011, *Akuntansi Sektor Publik,* Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Rudianto. (2009). *Penganggaran.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2003. *Metode Penelitian Bisnis.* Alfabeta: Bandung.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

_____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah* Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil.* Bandung :Rafika Aditama

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Uce Indahyanti. 2013. *Metodelogi Penelitian.* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, 2010, *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* ISSN:1907 –9958.